www.elsam.or.id

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

ASASI



Di Bawah Bayang-Bayang Oligarki

ASASI EDISI NOVEMBER DESEMBER 2015

Daftar Isi

04 **Editorial**
Mungkinkah Partisipasi Publik Melawan Kekuasaan Oligark?

Tak bisa dipungkiri bahwa gerak laju perekonomian di Indonesia berkaitan erat dengan sistem pemerintahan dan praktik politik di Indonesia. Namun kenyataannya sepanjang era pemerintahan pasca reformasi pertumbuhan perekonomian di Indonesia masih terkanalisasi dan menguntungkan bagi masyarakat golongan atas. Perkawinan antara oligarki dengan demokrasi menjadi paradoks yang tidak terelakkan. pembajakan demokrasi oleh oligark semakin mendepolitisasi kekuatan rakyat. Pemeliharaan apatisme dan pesimisme masyarakat dengan dunia politik yang semakin massif menjadikan pemerintahan jauh dari kontrol publik. Padahal kekuatan publik masih mampu menjadi garda depan dalam pemberantasan oligark di pemerintahan Indonesia

06 **Laporan Utama 1**
Di Dalam Perut Oligarki

Kekuatan modal memiliki pengaruh besar dalam bangunan politik Indonesia saat ini. Dari urusan penegakan hukum, pembuatan kebijakan dan undang-undang, hingga suara dalam Pemilu, semua dapat dipengaruhi kekuatan modal melalui politik uang. Kekayaan, dalam bahasa politik memang merupakan sumber daya kekuasaan yang sangat kuat dan fleksibel, bahkan hingga ke ranah politik. Dalam situasi kekayaan amat besar dan terkonsentrasi pada sangat sedikit orang di Indonesia, politik tereduksi dari ikhtiar untuk kemaslahatan publik, menjadi hanya upaya untuk mempertahankan kekayaan sebagian kecil masyarakat yang kaya. Sebuah relasi kuasa antara politik dan bisnis yang dinamakan: Oligarki.

11 **Laporan Utama 2**
Jokowi-JK Dalam Lingkaran Oligarki

Gelombang kekecewaan atas harapan besar yang ditaruh pada pasangan Jokowi-JK berangsur datang. Nawacita sebagai pedoman kerja pemerintahan baru yang menjanjikan perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum tidak sepenuhnya diimplementasikan. Kebijakan yang lahir justru bertentangan karena manuver politik pendukungnya. Pelemahan KPK dari luar dan dalam, mandegnya penyelesaian pelanggaran HAM Masa Lalu, dan penjatuhan hukuman mati, serta ancaman kebebasan masyarakat sipil diambang batas. Alhasil, pemerintahan Jokowi-JK yang dibebani optimisme tinggi masyarakat dipertanyakan kembali, Apakah mereka tersandera dalam Sistem Oligarki atau justru bagian dari sistem predatoris politik Indonesia?

16 **Opini**
Konsep Bisnis dan HAM Dalam Logika Kekuasaan Oligarki

Transformasi perlindungan hak asasi manusia pada akhirnya juga perlu mencakup dalam persoalan perekonomian khususnya bisnis dan perusahaan yang semakin berkembang. Namun dalam konteks Indonesia, konsep tersebut menjadi tantangan karena realita yang terjadi karena oligark menguasai sejumlah perusahaan besar di Indonesia. Akankah konsep bisnis dan HAM ini menjadi alat perpanjangan tangan oligark dalam melindungi kekayaannya, atau justru menjadi instrumen memberantas kaum oligark di Indonesia?

19 **Memelihara Konfrontasi Masyarakat Sipil Melawan Oligarki**

Keadaan perekonomian Indonesia menunjukkan angka kemiskinan yang berkurang, tetapi meningkatkan disparitas atau kesenjangan perekonomian yang semakin melebar. Artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca reformasi justru memberikan keuntungan paling besar bagi golongan masyarakat yaitu oligark. Kekuasaan oligark membuat politik dalam remokrasi representatif menjadi sesuatu yang tidak lagi memberi harapan. Tetapi dengan menjadikan konforntasi kepada kuasa oligarki sebagai platform bersama tentu menjadi langkah tepat untuk memberantas oligark, meskipun hal tersebut memiliki sejumlah tantangan.

24 **Resensi Film**
Mad Max :

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA
ASASI
www.elsam.or.id

Redaksional

Penanggung Jawab
Indriaswati Dyah Saptaningrum

Pemimpin Redaksi:
Lintang Setianti

Dewan Redaksi:
Andi Muttaqien, Wahyudi Djafar,
Ari Yurino, Wahyu Wagiman

Redaktur:
Adzkar Ahsinin, Adiani Viviana, Miftah Fadhli, Ruben Sumigar

Reporter:
Kosim, Paijo

Sirkulasi/Distribusi:
Khumaedy

Tata Letak dan Infografis:
Dodi Sanjaya

Penerbit
Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM)

Alamat Redaksi
Jl. Siaga II No 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510. Telepon (021) 7972662,79192564 Faximile : (021) 79192519. E-mail :office@elsam.or.id, asasi@elsam.or.id

Pembaca yang terhormat,

Pembajakan demokrasi oleh oligark sudah menguasai semua lini. Wacana pembatasan hak istimewa golongan atas untuk melindungi hak masyarakat luas melalui jalur politik sudah terciderai. Mulai dari penegakan hukum, pembuatan kebijakan dan proses Pemilu sudah membuka masuk politik uang untuk menguasainya. Bahkan katup kebebasan publik juga diancam untuk memperlancar pertahanan kekuatan modal bagi sebagian kelompok. Tetapi bukan tidak mungkin untuk meretas pesimisme dan apatisme yang sudah lama dikondisikan oligark untuk memandang politik Indonesia. Karena kenyataannya kekuatan publik masih dibutuhkan untuk menekan ruang gerak oligarki.

ASASI kali ini akan membahas mengenai reorganisasi kekuatan oligarki yang bertransformasi dari masa Orde Baru ke sistem demokrasi sekarang, bagaimana oligark bekerja khususnya dalam pemerintahan Jokowi-JK, dan bagaimana peran masyarakat sipil dalam menanggapi fenomena tersebut. Selain laporan jurnalistik tersebut, buletin ini juga menyajikan artikel opini dari Bramantya Basuki yang menulis mengenai Pemeliharan Konfrontasi Masyarakat Sipil Melawan Oligarki dan tulisan dari Kania Mezariani mengenai Konsep Bisnis dan HAM dalam Logika Kekuasaan Oligark. Simak pula tulisan resensi film "Mad Max" dari Miftah Fadhli, peneliti HAM dari ELSAM.

Selamat Membaca,

Redaksi senang menerima tulisan, saran, kritik dan komentar dari pembaca. Buletin Asasi bisa diperoleh secara rutin. Kirimkan nama dan alamat lengkap keredaksi. Kami juga menerima pengganti biaya cetak dan distribusi berapa pun nilainya. Transfer kerekening :
ELSAM Bank Mandiri Cabang Pasar Minggu No. 127.00.0412864-9

Partisipasi Publik vs Kekuasaan Oligarki

Pada akhir tahun 2015 Bank Indonesia mengeluarkan laporan data perekonomian Indonesia yang menunjukkan kaitannya angka kemiskinan dengan tingkat ketimpangan ekonomi Indonesia mulai dari tahun 1998 hingga 2014. Laporan yang berjudul Indonesia's *Rising Divide* menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi 11,3% di tahun 2014, turun dari 24% di tahun 1999. Namun disatu sisi, laporan tersebut menunjukkan tingkat konsumsi masyarakat yang menunjukkan nilai konsumsi 10% orang-orang paling kaya di Indonesia sama dengan konsumsi 54% warga termiskin pada tahun 2015. Artinya, sepanjang era pemerintahan pasca reformasi pertumbuhan perekonomian di Indonesia masih terkanalisasi dan menguntungkan bagi masyarakat golongan atas.

Hal ini menyebabkan kesenjangan antara penduduk miskin dan penduduk kaya juga semakin curam. Kesenjangan tersebut ditunjukkan dengan peningkatan Gini Ratio dalam 5 tahun belakangan ini. Gini Ratio atau Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan. Berdasarkan data BPS, gini ratio di tahun 2015 mencapai 0,38, sementara gini ratio di tahun 2015 mencapai 0,41. Nilai Gini Ratio hanya memiliki kisaran 0 sampai 1, semakin tinggi nilai gini ratio menunjukkan semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan atau kekayaan yang terdapat di Indonesia.

Tak bisa dipungkiri bahwa gerak laju perekonomian di Indonesia berkaitan erat dengan sistem pemerintahan dan praktik politik di Indonesia. 18 tahun silam, Indonesia mengalami transformasi kekuasaan dari rezim otoritarianisme Orde Baru menjadi sistem pemerintahan demokrasi. Sistem pemerintahan yang diharapkan mampu mendistribusikan keadilan demi pemenuhan hak masyarakat. Melalui jalur politik, demokrasi diharapkan mampu membatasi kewenangan golongan atas untuk pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Namun kenyataannya, melalui presentase yang disajikan laporan diatas, penguasaan ekonomi masih terpusat bagi segelintir orang. Kekuatan modal tersebut masih memiliki mengimpresi seluruh lini termasuk arsitektur politik di Indonesia. Penegakan hukum dan pembuat kebijakan, bahkan suara dalam Pemilu dapat dipengaruhi kekuatan modal melalui politik uang. Politik justru menjadi upaya untuk mempertahankan kekayaan sebagaian kecil masyarakat kaya yang dikenal sebagai oligarki. Bahkan mampu membajak sistem demokrasi dan menguasai semua perangkat demokrasi. Akhirnya kuasa oligarki mampu membajak wacana perjuangan hak publik yang digadangkan sistem demokrasi.

Pembajakan demokrasi oleh oligarki menjadi paradoks yang tidak terelakkan bahkan berkolaborasi dengan populisme yang "menjual" di masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam masa pemerintahan Jokowi-JK yang mengatasnamakanan kekuatan rakyat membangun sentimen populisme yang sederhana dan jauh dari carut marut oligarki dan mampu menggarap harapan publik. Namun kenyataannya, dewasa ini setiap kebijakannya belum menunjukkan hal signifikan yang sepenuhnya membawa kepentingan rakyat karena tidak mampu keluar dari manuver politik partai pengusungnya. Alhasil muncul pertanyaan apakah pemerintahan Jokowi JK tersandera dalam sistem oligarki atau justru bagian dari sistem predatoris politik Indonesia?

Lambat laun pembajakan demokrasi oleh oligark semakin mendepolitisasi kekuatan rakyat. Pemeliharaan apatisme dan pesimisme masyarakat dengan dunia politik yang semakin massif menjadikan pemerintahan jauh dari kontrol publik. Padahal demokrasi juga berarti partisipasi publik yang dapat menjadi modal bersama dalam menyapu pemerintahan oligark yang selama ini bercokol di politik Indonesia. Berangkat dari hal inilah buletin ASASI edisi November dan Desember 2015 ini bertujuan untuk meningkatkan kembali partisipasi publik untuk mengontrol dan memberikan tekanan dalam rangka memberantas kekuatan oligark.

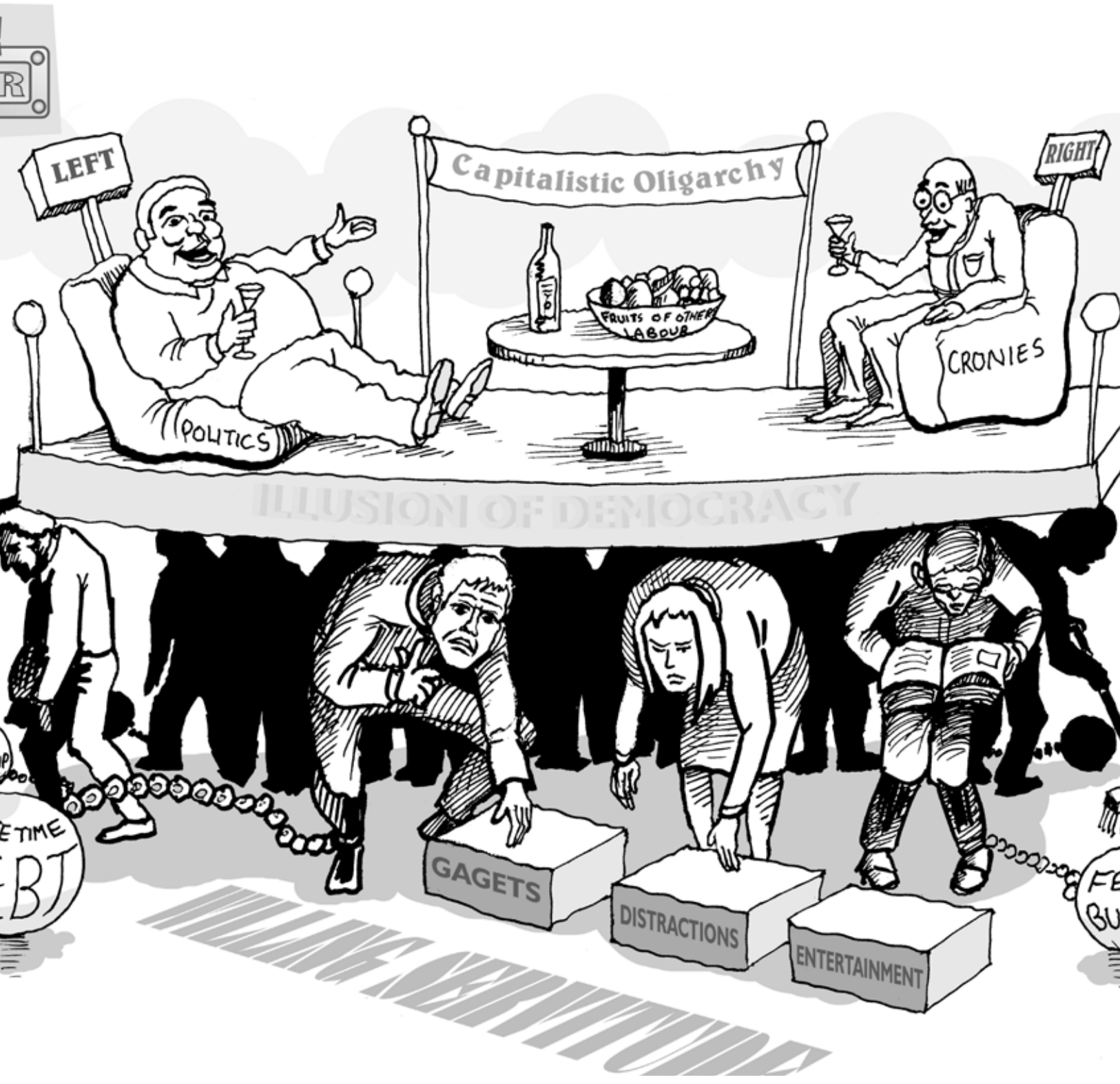

Ilustrasi Oligarki (Sumber : perdurabo10.net)

Di dalam Perut Oligarki

Kekuatan modal memiliki pengaruh besar dalam bangunan politik Indonesia saat ini. Dari urusan penegakan hukum, pembuatan kebijakan dan undang-undang, hingga suara dalam Pemilu, semua dapat dipengaruhi kekuatan modal melalui politik uang. Kekayaan, dalam bahasa politik memang merupakan sumber daya kekuasaan yang sangat kuat dan fleksibel, bahkan hingga ke ranah politik. Dalam situasi kekayaan amat besar dan terkonsentrasi pada sangat sedikit orang di Indonesia, politik tereduksi dari ikhtiar untuk kemaslahatan publik, menjadi hanya upaya untuk mempertahankan kekayaan sebagian kecil masyarakat yang kaya. Sebuah relasi kuasa antara politik dan bisnis yang dinamakan: Oligarki.

Pada tahun 1988, Richard Robinson memberikan pandangan yang menarik dalam membaca politik Indonesia dan relasinya dengan kekuatan modal. Dalam bukunya berjudul *The rise of capital,* ia menjelaskan hubungan yang erat antara politik dan bisnis dalam sistem politik Indonesia di masa orde baru. Merajalelanya korupsi di masa Orde Baru menjadi indikator bahwa pemerintah berjalan tidak atas kepentingan publik, melainkan atas kepentingan privat para birokrat dan pemodal.

Setelah 17 tahun kekuasaan Orde Baru berakhir, situasi politik Indonesia tidak banyak berubah meski ruang demokrasi telah dibuka. Berbagai peristiwa politik yang terjadi sepanjang tahun 2015 menunjukan terjadinya kemerosotan agenda publik dalam kebijakan pemerintah Jokowi-JK. Kasus renegosiasi Kontrak Karya Freeport yang menunjukan kepentingan privat para pejabat teras lembaga tinggi negara dan upaya pengebirian Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu potret menguatnya kembali kuasa modal dalam menentukan laju pemerintahan.

Hukum Besi Oligarki

Oligarki termasuk salah satu konsep yang sering digunakan namun jarang dirumuskan dengan jelas dalam ilmu sosial. Jeffrey Winters, profesor ilmu politik dari Northwestern University mengatakan bahwa Oligarki berawal dari adanya Stratifikasi kekayaan dalam masyarakat. "Seorang oligark adalah figur yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya." ujar Jeffrey yang secara khusus meneliti Oligarki di Indonesia.

Adanya kekayaan amat besar yang terkonsentrasi pada sebagian kecil masyarakat dan juga motif utama oligark untuk mempertahankan kekayaan merupakan dua kondisi dasar yang memungkinkan adanya Oligarki. Hasil penelitian Networth Global mengenai seberapa terkonsentrasinya kekayaan di dunia menunjukan bahwa 1% penduduk dunia menguasai 43% kekayaan di dunia. Sedangkan 9% di bawahnya menguasai 44 % Kekayaan di dunia. Sementara 90%, atau mayoritas masyarakat di dunia sangat inferior dalam kekayaan.

Dalam bukunya "Oligarchy" (2011), Jeffrey Winters juga memaparkan bagaimana stratifikasi kekayaan di Indonesia begitu besar. Jarak kekayaan antara 50 orang terkaya Indonesia dengan GDP rata-rata penduduk Indonesia adalah 630.000 kali lipat. Angka tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang perbandingannya berjumlah 20.000 kali lipat. Disparitas yang demikian besar tersebut kemudian bertemu dengan realitas politik bahwa kekayaan *(wealth)* merupakan sumber daya kekuasaan yang sangat kuat dan fleksibel. Konsentrasi kekayaan ini dengan sendirinya mengakibatkan adanya konsentrasi kekuasaan.

Menurut Jeffrey Oligarki lebih tepat dimengerti sebagai suatu *proses politik* dibandingkan sebagai benda atau bentuk pemerintahan. "Oligarki adalah politik pertahanan kekayaan oleh mereka yang memiliki kekayaan material amat besar dengan cara mempengaruhi atau terjun langsung dalam pemerintahan, semata-mata untuk

mempertahankan atau melipatgandakan kekayaannya," ujar Jeffrey. Politik pertahanan kekayaan tersebut memiliki tantangan dan kapasitas tertentu yang tak dimiliki bentuk dominasi atau eksklusi minoritas lain dalam masyarakat. Dalam relasinya dengan kekuasaan, Oligark menggunakan kekayaannya untuk berkuasa, sedangkan rakyat non-kaya hanya memakai sarana partisipasi politik yang ada seperti Pemilu sebagai modal politiknya.

Senada dengan Winters, Airlangga Pribadi, pengajar di Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga, juga menjelaskan Oligarki sebagai sebuah proses politik. "Oligarki adalah sistem relasi kekuasaan dari kekuatan sosial minoritas yang berkuasa dalam arena politik yang memungkinkan konsentrasi persebaran kemakmuran, otoritas publik dan berbagai bentuk mekanisme pertahanannya bagi kepentingan dari jejaring ekonomi-politik di seputar mereka," jelas Airlangga. Lebih lanjut, kandidat PhD Asia Research Center Murdoch University, Australia, ini juga menjelaskan bahwa jejaring kekuasaan yang dibangun oligark mampu membajak ruang politik demokrasi serta birokrasi kenegaraan dan mengambil sumber dana publik bagi kepentingan mereka. "Karakter dari oligarki di struktur politik Indonesia bersifat predatoris (pemangsa)," ujarnya.

Ketergantungan bisnis para oligarki dengan kebijakan pemerintah membuat oligark akan selalu berusaha mempengaruhi kekuasaan. Dalam mempengaruhi kekuasaan tersebut, para oligark dapat terjun langsung ke politik dengan modal yang besar ataupun dengan mensponsori politisi dengan tujuan mempengaruhi kekuasaan. Hal ini yang menurut Luky Djani, pendiri lembaga penelitian Institute for Strategic Initiatives (ISI), berbeda antara pola olgarki di negara maju dan negara berkembang. "Dalam negara yang demokrasinya sudah mapan, para oligark akan bersekutu dengan pemerintah dan mempengaruhi kebijakan di luar pemerintahan, sedangkan di negara berkembang, mereka lebih cenderung ingin terjun ke politik karena tidak ada jaminan kalau mereka hanya bersekutu saja," ujar Luki Djani.

Transformasi Oligarki di Indonesia

Vedi R. Hadiz, salah satu ilmuwan sosial politik Indonesia dan juga murid dari Richard Robinson menjelaskan bahwa lahirnya oligarki di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses konsolidasi kapitalisme yang dimulai di awal Orde Baru berdiri, ditandai dengan mulai masuknya modal asing. Oligarki muncul di masa Orde Baru ditandai dengan adanya perselingkuhan antara aparat birokrasi-politik dengan pebisnis besar.

"Kita bisa melihat bagaimana kepentingan keluarga-keluarga birokrasi-politik dan bisnis jenjang atas menyatu untuk membentuk oligarki yang menguasai ekonomi dan politik Indonesia," ujar Vedi. Di satu pihak konglomerat menjadi besar karena aliansi politik yang memberikan kemudahan dan perlindungan bagi mereka. Di lain pihak, banyak kelompok bisnis juga muncul dari lingkungan birokrasi dan politik itu sendiri – contohnya keluarga Soeharto.

Berkembangnya oligarki di era Orde Baru, menurut Muhammad Ridha, salah seorang peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari Peristiwa 1965. "Adanya penghancuran gerakan rakyat sebagai balance of forces oleh pemerintah setelah peristiwa 1965 memungkinkan konsolidasi kapitalisme di Indonesia," ujar Ridha. Matinya gerakan rakyat membuat sumber daya kekuasaan politik yang tersisa menjadi dominan, yaitu kekuatan modal dan militer. Menurut Ridha, ada tiga pola oligarki, yaitu: Penggunaan kekuasaan politik oleh oligark untuk melindungi diri sendiri, perampokan sumber daya publik dan juga relasi predatoris para oligark.

Pasca tumbangnya rezim otoritarian Orde Baru, oligarki yang dibesarkan oleh otoritarianisme ternyata mampu beradaptasi dan tetap berjaya di masa demokrasi. Elemen-elemen oligarki ini saling berkompetisi untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan, karena sifatnya tidak tersentralisasi seperti pada masa Orde Baru, "Oligark tetap mendominasi perekonomian dan di samping itu juga menguasai institusi demokrasi seperti parlemen dan partai, antara lain lewat praktek politik uang," ujar Vedi Hadiz yang bekerja sebagai Profesor of Asian Studies di University of Melbourne, Australia.

Jeffrey Winters menggolongkan oligarki di masa Orde Baru sebagai Oligarki Sultanistik karena proses pertahanan kekayaan *(wealth defense)* selalu kembali ke satu orang yaitu Soeharto. "Soeharto menciptakan oligark di Indonesia dan memposisikan diri sebagai oligark nomor 1 (satu) di seluruh Indonesia, sehingga kekuasaan Soeharto berdasarkan posisi dia sebagai elit politik (yaitu presiden) dan juga sebagai oligark tertinggi di Indonesia," jelas Jeffrey.

Bagi Jeffrey, Oligarki di bawah Soeharto hanya punya satu tujuan yaitu mengambil kekayaan alam

Indonesia secepatnya dan membagi-bagikan kekayaan tersebut di antara segelintir orang. "Ekonomi Indonesia adalah ekonomi ekstraktif bukan ekonomi produktif. Jadi, kita jangan heran kalau oligarki di Indonesia terfokus kepada proses ekstraksi kekayaan dan sistim bagi-bagi di antara mereka sendiri," ujar Jeffrey.

Sedangkan pasca reformasi, Jeffrey Winters mengkategorikan oligarki yang ada sebagai oligarki penguasa kolektif (ruling oligarchy). "Oligarki kolektif ini bisa jinak kalau para oligark bekerja sama dan punya etika kuat di antara mereka sendiri, biasanya ini butuh waktu lama sekali untuk mencari norma kerja sama. Maka oligarki kolektif bisa liar karena berkompetisi terus menurus dan sering berkelahi secara horizontal," jelas Winters.

Selain transisi dari oligarki sultanistik ke oligarki penguasa kolektif sejak 1998, Winters juga menyoroti adanya transisi dari oligarki yang berbasis di Jakarta ke oligarki yang berada di setiap daerah. Hal ini merupakan salah satu hasil dari politik desentralisasi di era reformasi. "Kekuasaan kekayaan (wealth power) menjadi sangat penting dalam setiap pemilu di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota," ujar Winters.

Hal senada juga diungkapkan Vedi Hadiz yang juga menyoroti problem yang lahir dari adanya desentralisasi. "Di tingkat lokal, elemen-elemen yang tadinya berada di pinggiran struktur oligarki yang tersentralisasi berupaya untuk menciptakan oligarki lokal sendiri dengan memanfaatkan peluang desentralisasi dan otonomi daerah," ujar Vedi Hadiz. Meskipun demikian, aliansi bisnis dan birokrasi/politik pada umumnya

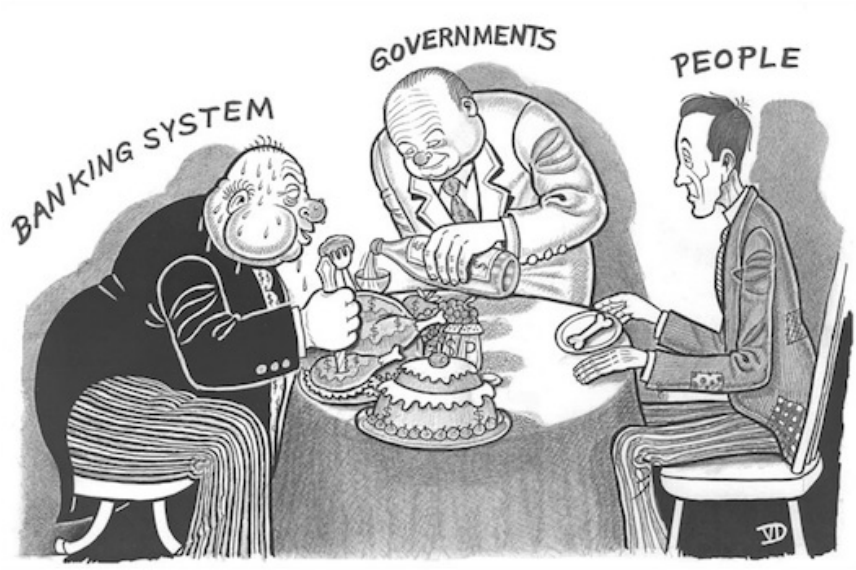

Ilustrasi Oligarki (Sumber : Indoprogress)

terjadi di tingkat lokal juga, meskipun sering dalam bentuk yang lebih cair.

Adapun dalam persoalan bidang bisnis para oligark itu sendiri, fenomena di Indonesia menunjukan bahwa bisnis oligark terpusat di bidang ekstraktif. "Berbeda dengan oligark di Amerika yang fokus bisnisnya produktif (industri), oligark di Indonesia sibuk memperebutkan sumber daya alam Indonesia dalam bisnsi ekstraktif," ujar Jeffrey Winters.

Terpusatnya bisnis oligark di bidang ekstraktif ini menurut Luky Djani juga menjadi penyebab mengapa oligark di Indonesia cenderung ingin masuk ke dalam pemerintahan ketimbang beraliansi dengan politisi. "Para oligark bisnisnya sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah, pengeluaran konsesi hingga ekspansi bisnis, kontrak-kontrak dan sebagainya, oleh karena itu akan lebih mudah jika mereka terjun langsung dalam penyusunan kebijakan yang dapat memproteksi mereka," ujar Luky Djani.

Oligarki dan Demokrasi Indonesia

Dalam konteks Indonesia pasca pemerintahan Soeharto, proses demokratisasi dan desentralisasi politik tidak serta merta memperluas akses politik dari mayoritas rakyat untuk mempengaruhi arena politik maupun tatanan ekonomi secara terbuka melalui penegakan aturan hukum yang imparsial. Airlangga Pribadi menjelaskan situasi tersebut muncul akibat praktek politik demokrasi di tingkat nasional maupun lokal masih didominasi politik oligarki meskipun proses demokratisasi memberikan ruang positif bagi lahirnya kelembagaan politik baru yang lebih terbuka dibandingkan dengan era Orde Baru. "Proses demokratisasi sama sekali tidak mendorong perubahan konfigurasi kekuasaan dan hadirnya kekuatan sosial baru menggantikan kekuatan sosial yang lama, justru yang terjadi adalah terserapnya kekuatan-kekuatan reformis ke dalam gerbong oligarki," jelas Airlangga Pribadi.

Proses reformasi 17 tahun silam dalam tataran elit pada dasarn-

ya tak bisa dilepaskan dari peran sebagian oligark. Luky Djani mengatakan bahwa di pertengahan tahun 90'an, sebagian oligark sudah tidak menganggap Soeharto sebagai protektor politik mereka. "Mereka harus siap untuk melakukan antisipasi apabila terjadi pergantian rezim, makanya mereka secara tidak lagsung men-support gerakan reformasi dan oligark ini yang kemudian relatif lebih cepat menyesuaikan diri di sistem politik yang baru," ujar Luky Djani. Pasca institusi demokrasi seperti multipartisme dan Pemilihan Umum dibuat, para oligark pula yang cepat mengisi pos tersebut. "Para oligark yang dulunya semua Golkar, pasca reformasi langsung membentuk partai baru atau bergabung dengan partai politik yang lain berdasarkan kalkulasi kepentingan ekonomi," tambah Luky Djani yang pernah dicalonkan menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut Muhammad Ridha reorganisasi kekuatan oligark pasca reformasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari agenda neoliberalisme. Sebagai salah satu fase dalam perkembangan ekonomi kapitalisme, prinsip dari neoliberalisasi yang mengkondisikan kedaulatan dari negara peri-peri menciptakan sistem monarki kapital sehingga tergantung pada perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi perekonomian global, yang juga dialami Indonesia. "Pasca reformasi, Indonesia sepakat dengan agenda pasar tahun 1998. Hal ini ditandai dengan adanya MoU dengan IMF sehingga diharuskan menyusun struktur negara yang kompatibel dengan ekonomi pasar." Jelas Ridha.

Ridha beranggapan upaya mengasimilasi struktur negara yang kompatibel dengan ekonomi pasar diperlukan liberalisasi politik sehingga melakukan perubahan terhadap institusi negara, salah satunya dengan munculnya konsep desentraliasasi yang mengizinkan keputusan pasar berada di tingkat lokal untuk mempermudah transmisi modal dan pertukaran kapital. Termasuk agenda good goverment atau tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemerintahan Indonesia, menurut Muhammad Ridha hal tersebut telah menjadi alat bagi oligark untuk kembali menjalankan kepentingan dan mengamankan aset atau kapital bagi sekelompok orang. Hal ini tidak lain diakibatkan karena tata kelola pemerintah selalu dikondisikan jauh dari relasi sosial. "Situasi dan kondisi tata pemerintahan selalu dibuat menjadi lingkup yang vakum dari relasi sosial, sehingga agenda good government selalu disetir oleh pihak yang berkuasa yang telah lama mengelola pada masa Orde Baru," jelas Ridha.

Menanggapi fenomena tersebut, Jeffrey Winters pun berpandangan bahwa pada dasarnya para oligark memang menyepakati demokrasi untuk menjadi arena pertarungan selanjutnya pasca Orde Baru. "Pasca Soeharto, para oligark mencari solusi untuk dapat mempertahankan diri dan demokrasi adalah solusinya, meski sebelumnya harus diatur dulu oleh mereka," ujar Jeffrey.

Mahalnya biaya berdemokrasi di Indonesia diyakininya sebagai alasan mengapa oligarki bercampur dengan demokrasi di Indonesia. "Uang besar menjadi bahan bakar seluruh politik di Indonesia, tidak ada modal politik yang lebih penting selain uang," Ujar Jeffrey. Jeffrey Winters pun berpandangan bahwa pada dasarnya oligarki memang dapat berjalan berdampingan dengan demokrasi dalam satu sistem yang sama. "Oligarki muncul bukan karena demokrasi berkurang, melainkan karena konsentrasi kekayaan menjadi terlalu besar di dalam beberapa tangan saja.," ujar Jeffrey Winters.

Dominasi kaum oligark meningkat terus menerus karena sistem hukum di Indonesia sangat lemah. Penegakan hukum membantu sekali karena oligarki menjadi jauh lebih jinak. "Kaum oligark yang dibatasi oleh sistim hukum yang kuat lebih baik dibanding kaum oligark yang bebas untuk mendistorsikan ekonomi dan politik Indonesia," ujar Winters.

Situasi politik yang sangat bergantung pada kehendak oligarki ini menyebabkan segala instrumen demokrasi pada dasarnya tidak dapat diakses seutuhnya oleh masyarakat. Kedaulatan rakyat seolah hanya menjadi ilusi ketika pilihan politik telah ditentukan oleh para oligark.

***



Usai dilantik, Jokowi langsung diarak menuju Istana Negara, Jakarta
(Sumber : indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au)

JOKOWI-JK DALAM LINGKARAN OLIGARKI

Gelombang kekecewaan atas harapan besar yang ditaruh pada pasangan Jokowi-JK berangsur datang. Nawacita sebagai pedoman kerja pemerintahan baru yang menjanjikan perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum tidak sepenuhnya diimplementasikan. Kebijakan yang lahir justru bertentangan karena manuver politik pendukungnya. Pelemahan KPK dari luar dan dalam, mandegnya penyelesaian pelanggaran HAM Masa Lalu, dan penjatuhan hukuman mati, serta ancaman kebebasan masyarakat sipil diambang batas. Alhasil, pemerintahan Jokowi-JK yang dibebani optimisme tinggi masyarakat dipertanyakan kembali, Apakah mereka tersandera dalam Sistem Oligarki atau justru bagian dari sistem predatoris politik Indonesia?

Kehadiran Joko Widodo dalam kancah politik Indonesia dianggap sebagai harapan baru pemerintahan Indonesia. Dengan penampilan sederhana dan latar belakang non keluarga politik elit atau kekuatan politik tradisional seperti militer ataupun taipan, Jokowi berhasil memikat popularitas dari masyarakat. Penampilannya dan kegemarannya "blusukan" dianggap masyarakat luas sebagai sosok tepat untuk melawan pejabat korup yang menjadi ciri khas pegiat politik Indonesia hasil dari pola kekuasaan era Orde Baru yang tidak lepas dari jejaring kekuasaan oligarki.

Menurut Vedi Hadiz, Profesor of Asian Studies di University of Melbourne, pasangan Jokowi-JK dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan lingkaran oligarki berdasarkan analisis pribadi lepas pribadi. Meskipun Jokowi merupakan salah satu Presiden pasca-Orde Baru pertama yang berasal dari luar oligark Indonesia, tetapi hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari sosok Jusuf Kalla yang merupakan bagian integral dari oligarki Orde Baru. Hal ini disebabkan karena partai-partai pendukung pasangan nomor 2 pada Pemilu 2014 kemarin yang dikenal dengan Koalisi Indonesia Hebat kenyataanya juga banyak dikuasai oleh lingkungan oligarki yang dibesarkan masa lalu. "Bagaimanapun pemerintahan mereka tidak bisa lepas dari cengkraman oligarki" jelas Vedi Hadiz Direktur Program Penelitian Indonesia dan juga Professor of Asian Societies and Politics di Asia Research Centre, Murdoch Univeristy, Australia.

Dalam konteks ketokohan dan popularitas Jokowi ditengah tren politik Indonesia, Vedi Hadiz menganggap Jokowi tidak mempunyai kendaraan politik dan organisatoris sendiri yang independen untuk melepas kepemimpinan kepentingan oligarki lama yang telah beradaptasi dengan baik dengan demokrasi. "Kita bisa melihat hal tersebut dari kesulitan Jokowi dalam meng-*goal*kan kebijakan-kebijakannya yang berpotensi merubah pola alokasi sumber daya negara secara cukup signifikan. Hal ini merupakan sebuah ancaman bagi para oligark karena dianggap mengganggu "kepentingan-kepentingan" yang sudah lama bercokol di berbagai sektor" jelas Vedi Hadiz.

Hal serupa dilontarkan oleh Airlangga Pribadi, akademisi dari Universitas Airlangga Surabaya yang menyatakan bahwa sejak tampil dalam Pemilu Presiden 2014 lalu, Jokowi dapat dikatakan sebagai simbol aktor reformis dan populis yang lahir dari pertarungan politik lokal yang chaotik dan kemudian membutuhkan kekuatan-kekuatan politik dominasi oligarki untuk maju dalam gelanggan politik nasional.

"Setelah terpilih menjadi Presiden RI kemudian terbukti agenda-agenda reformasi yang dimanisfestasikan melalui program Nawacita tersandera oleh manuver dan pertahanan politik untuk memperoleh kemakmuran dari kekuatan oligarki di sekitarnya (red-Jokowi)" jelas pria yang merupakan salah satu dosen Departemen Politik FI-



Usai dilantik, Jokowi langsung diarak menuju Istana Negara, Jakarta(Sumber : Tempo.co)

SIP Universitas Airlangga.

Namun anggapan tersanderanya Jokowi dalam oligark yang memimpin panggung politik Indonesia dewasa ini dirasa Muhammad Ridha merupakan argumen yang sangat naif. Menurut peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) ini, secara dinamis Jokowi jelas mempunyai relasi dengan oligarki lama. Hal ini terlihat dari proses kenaikan dirinya sejak menjadi walikota Solo pada tahun 2005 lalu. "Kita semua tahu bahwa dirinya diusung PDIP, ketika dirinya naik sebagai calon kepala daerah dan presiden, jelas dirinya akan melakukan konsesi dan negosiasi dengan oligark di PDIP yang menguasai partai tersebut. Sehingga Jokowi sendiri sebenarnya tidak imun dari kekuatan politik oligarki, karena sosok Jokowi lahir hasil dari politik oligarki itu sendiri" jelas pria yang akrab disapa Ridha.

Hal ini juga dipertegas dengan anggapan Jeffrey Winters mengenai keberadaan Jokowi ditengah proses politik Indonesia dan oligark yang sudah berafiliasi dengan demokrasi. Menurutnya dalam konteks ketahanan hidupnya, oligarki yang sudah mapan berdampingan dengan demokrasi dalam satu sistem yang sama, maka yang dibutuhkan bukanlah figur politik. Hal ini disebabkan karena kekuatan oligarki mampu memposisikan tokoh tersebut menjadi kaumnya dan mampu mengkondisikan untuk tidak dapat merubah struktur tersebut. "Tidak ada figur politik yang bebas dari kaum oligark dan dari politik oligarki di Indonesia. Termasuk Jokowi-JK" jelas Winters, profesor dari Northwestern University.

Menilik Indikator Kebijakan Pemerintahan Intervensi Oligarki

Di penghujung tahun 2015, media massa dan media sosial diramaikan dengan isu Setya Novanto yang turut intervensi dalam proses perpanjangan kontrak perusahaan tambang terbesar asal Amerika Serikat di tanah Papua, PT Freeport. Pembicaraan Setya Novanto dan salah satu pengusaha dengan direksi perusahaan tersebut dianggap sebagai potret bagaimana oligarki Indonesia masih hidup dalam tubuh pemerintahan menggunakan kendaraan partai politik. Belum lagi persoalan pelemahan KPK dan impunitas serta reproduksi kekerasan yang masih berlangsung hingga sekarang. Rentetan realita tersebut dapat menjadi indikator bahwa pemerintahan Indonesia belum kebal dari intervensi oligarki.

Menurut Airlangga Pribadi kontestasi dan pertarungan antar oligarki dalam perburuan rente terlihat jelas dalam kasus negosiasi Freeport dengan Pemerintahan Indonesia. Agenda nasionalisasi Freeport yang koheren dengan seruan politik populisme Jokowi pada kenyataannya tersandera oleh praktik perburuan rente dan manuver untuk meminta saham yang tidak saja dilakukan oleh kekuatan legislatif kalangan oposisi tetapi juga melibatkan kekuatan politik di internal pemerintahan Jokowi.

Selain perseteruan dibalik negosiasi Freeport dan Indonesia, realita mengenai pelemahan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia yang selama ini digadang oleh KPK ditandai dengan terlihatnya kompromi terhadap tekanan-tekanan politik elit yang memberikan keuntungan praktis bagi pihak kepolisian. "Kompromi yang terjadi atas tekanan-tekanan politik elit pemerintahan Jokowi JK cenderung memberikan angin kepada pihak kepolisian," jelas Airlangga. Menurutnya keadaan demikian dapat memperluas kemungkinan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia akan dikontrol atau sejalan dengan kepentingan-kepentingan kekua-

saan elit yang lebih dominan dibandingkan pelaksanaan supremasi hukum secara imparsial. "Situasi yang terjadi sekarang memperlihatkan bahwa agenda pemberantasan korupsi menyasar pada kekuatan oligarki telah bermanuver dalam kancah politik dalam tatanan eksekutif, legislatif, maupun partai politik," tambah Airlangga yang menjadi kandidat PhD Asia Research Center Murdoch University, Australia.

Termasuk dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang masih mengalami stagnansi dalam pemerintahan yang baru ini. Sebagai salah satu isu penting dalam masa Pemilu, pada masa kampanye isu pelanggaran HAM secara praktis dimenangkan oleh pasangan Jokowi-JK dibandingkan dengan lawannya pada Pemilu 2014. Namun meskipun demikian, implementasi dari janji kampanye tersebut masih absen. Hal ini menurut Airlangga dikarenakan masih kerasnya benturan kepentingan untuk bertahan dan berkuasanya lapisan elit sisa Orde Baru yang berada dalam kalangan oposisi maupun yang berada di dalam istana. Alhasil upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu pada masa pemerintahan Jokowi-JK masih absen.

Menurut Vedi Hadiz indikator pemerintahan yang terindikasi tersusupi oligarki dapat dilihat dari komposisi kepentingan dominan yang relatif sempit dan bersifat ekslusioner. Meskipun ada tokoh baru reformis dalam panggung politik Indonesia, namun logika kekuasaan yang digariskan kepentingan oligarkis masih menjadi koridor yang harus dijalani tokoh tersebut. "Mereka terpaksa untuk mengikuti logika kekuasaan kepentingan oligarkis karena akan tersingkir apabila tidak melakukan hal tersebut. Hal inilah yang menyulitkan orang-orang 'reformis' yang kelak masuk ke dalam pemerintahan, mereka harus bertindak sesuai dengan garis jika tidak ingin terpental," jelas Vedi Hadiz.

Sejak 1998, sejarah Indonesia menunjukkan kepiawan oligarki yang fleksibel dengan daya adaptasinya. Bahkan sebelum reformasi, Vedi Hadiz menyebutkan bahwa kebijakan liberalisasi ekonomi mampu diadaptasi pihak oligarki. "Banyak kebijakan liberalisasi ekonomi yang bahkan mendapat dukungan lembaga internasional yang sebenarnya di arahkan untuk menghantam oligarki, ternyata mampu diambil alih sedemikian rupa untuk melebarkan sayap." Sebagai contoh maraknya liberalisasi sektor perbankan dan finansial di akhir tahun 1980an yang justru memberikan ruang bagi kekuatan oligarki dalam mengakses sumber dana murah dari dalam negeri. Hal tersebut terlihat dari banyaknya konglomerat yang tiba-tiba memanfaatkan peluang untuk mendirikan bank. "Selain akses sumber dana murah, pihak oligark juga mendapatkan akses baru kepada sumber dana dari luar negeri. Hal tersebut terlihat dari membengkaknya hutang luar negeri sektor swasta Indonesia dari 1989 hingga 1997 yang berujung pada malapetaka ekonomi yang menjatuhkan Orde Baru," jelas Vedi Hadiz.

Jalan Panjang Indonesia Membangun Imun Dari Kekuatan Oligarki

Tatanan transformasi pemerintahan Indonesia dari kediktaktoran menjadi sistem demokrasi kenyataannya tidak menyingkirkan lingkaran oligarki. Kepandaian oligarki membaca peluang perubahan sistem pemerintahan di Indonesia membuat lingkaran tersebut mampu berpenetrasi dengan baik serta beradaptasi pada demokrasi dan segala aspeknya. Hal ini menegaskan bahwa oligarki sebagai suatu sistem dan proses politik yang upaya memberantasnya harus berdasarkan analisis struktural secara objektif.

"Peluang terbaik untuk mengembalikan fitrah pemerintahan tanpa intervensi oligark sudah terlewat pada masa awal reformasi" jelas Vedi Hadiz. Menurutnya untuk membuka peluang serupa diperlukan krisis dalam tubuh oligarki tersebut sebagaimana terjadi di akhir tahun 1990an. "Namun pada waktu itu, tidak ada kekuatan yang koheren dan terorganisasi dengan baik di luar oligarki yang siap mengambil alih ketika oligarki berada dalam krisis," tambahnya.

Pada perkembangnnya oligarki mampu melakukan perampokan sumber daya publik melalui intervensi pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadikan usaha pembatasan berkembangnya oligark di panggung politik Indonesia semakin sulit. Undang-Undang Partai Politik sebagai salah satu instrumen hukum yang menjadi pintu masuk terjun ke dalam pemerintahan Indonesia sudah

diformulasikan sebagai regulasi yang tertutup dari kepentingan politik diluar oligarki. Misalnya menurut pasal 3 poin (c) Undang-Undang Partai Politik Nomor 20 tahun 2001 mensyaratkan pembentukan partai membutuhkan kepengurusan pada setiap provinsi, dengan minimal 75% dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan. "Syarat pembentukan partai politik tersebut membutuhkan biaya yang besar untuk turut serta ke dalam parpol (partai politik –red) dan yang memiliki akses tersebut hanyalah para oligark." Jelas Muhammad Ridha.

Ridha berpendapat oleh karena oligarki sendiri adalah sentralisasi kekuasaan di tangan segelintir elit yang membangun kondisi dalam struktur politik, maka untuk merubahnya diperlukan struktural alternatif untuk menandingi monopolisasi yang terjadi. "Sangat imperatif untuk membangun politik alternatif yang basisnya adalah mereka yang selama ini disingkirkan dari politik oligarki seperti buruh, tani, kelas menengah kritis" jelas Ridha. Hal ini merupakan salah satu makna demokrasi dalam tatanan partisipasi dari masyarakat luas.

Partisipasi publik dapat pula diwujudkan untuk memberikan tekanan bagi elit oligarki yang bercokol di pemerintahan. Adapun tujuan dari tekanan publik tersebut tidak lain untuk memberikan sudut pandang atau warna berbeda dalam konteks kepentingan publik dalam setiap kebijakan yang dilahirkan. Kebijakan sistem Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) merupakan salah satu contoh sebuah kebijakan yang terindikasi membawa kepentingan publik. "Kebijakan sistem BPJS memperliatkan adanya perubahan pola terhadap distribusi negara, sehingga menyadarkan masyarkat luas bahwa ada perlindungan sosial universal yang menjadi tanggung jawab negara" tambah Ridha.



*Ilustrasi Jokowi dalam kepungan oligar*k

Selain terkonsolidasinya gerakan alternatif yang menekan elit oligark, upaya untuk membatasi ruang gerak perkembangan oligark Indonesia dewasa ini adalah dengan melakukan diaspora. Hal ini dirasa Luki Djani lebih mudah dilakukan ketimbang membentuk kekuatan sosial terorganisir yang memiliki pengaruh politk formal karena peraturan perundangan sistem politik masih dikondisikan otonom khusus untuk pihak oligark. Diaspora dilakukan dengan mengutus beberapa orang untuk masuk ke partai-partai dengan tujuan mendinamisasikan partai politik tersebut. Namun hal ini perlu didukung dengan kesepakatan atau konsensus dengan masyarakat sipil dengan pihak yang masuk ke partai yang bertujuan mengakumulasi kekuatan. "Yang selama ini terjadi ada beberapa aktivis masuk menjadi pemain politik tetapi terbawa arus permainan oligark. Oleh karena mereka berkompromi dengan pemain partai dan menentukan langkah politik yang ada, maka diperlukan konsesus bersama antara masyarakat sipil untuk mengikat pihak yang berdiaspora," tambah pendiri lembaga penelitian Institute for Strategic Initiatives itu.

Sedangkan menurut Jeffrey Winters terdapat tiga langkah strategis untuk mengendalikan oligarki di Indonesia. Pertama, adalah pembatasan penggunaan kapital dalam aktivitas politik pemerintahan. Kedua, menurunkan stratifikasi kekayaan dalam masyarakat. "Pada masa Orde Lama, Indonesia tidak memiliki oligark karena perekonomiannya lebih merata," katanya. Dan langkah ketiga adalah dengan meningkatkan kekuasaan partisipasi rakyat untuk mengimbangi kekuasaan kaum oligark yang berbasis uang. "Kekuatan partisipasi rakyat harus ditingkat untuk menciptakan keseimbangan kekuatan kaum oligark yang berbasis kapital dan memenuhi aktivitas politik di Indonesia," jelas Winters.

Penduduk Indonesia +- 256 juta orang

Selama 15 tahun perekonomian di Indonesia meningkat

GDP 5,4% pada tahun antara 2002-2014

Pendapatan Tahun 2014 : Rp 470 M



80% penduduk miskin tidak merasakan dampak dari peningkatan ekonomi

20% penduduk tergolong kaya merasakan dampak dari peningkatan ekonomi

Disparitas Kekayaan di Indonesia

Tahun 2002 — **Penduduk Indonesia golongan Kaya (10%) tingkat konsumsinya setara dengan 42% dari penduduk miskin**

Tahun 2003 s/d 2010 — **konsumsi golongan kaya Indonesia (10%) tumbuh lebih dari 6% setiap tahunnya sementara konsumsi golongan miskin (40%) tiap tahun berkurang 2%**

Tahun 2014 — **Penduduk Indonesia golongan Kaya (10%) tingkat konsumsinya setara dengan 54% golongan miskin**

Tingkat Konsumsi Masyarakat Indonesia



Konsep Bisnis dan HAM dalam Logika Kekuasaan Oligarki

Oleh **Kania Mezariani G.***

"Dari 100 entitas ekonomi terbesar di dunia, 51 adalah perusahaan dan 49 adalah negara"

Hal tersebut merupakan hasil penelitian Sarah Anderson and John Cavanagh di tahun 2000. Fakta ini menjadi perdebatan mengenai pengaruh kekuasaan yang terus berjalan hingga saat ini. Ada yang berpendapat bahwa kekuasaan negara berkurang seiring meningkatnya pengaruh perusahaan multinasional, dan pula menjadi salah satu faktor terjadinya krisis ekonomi global di tahun 2008. Apakah hal tersebut mencerminkan kegagalan negara untuk mengontrol para oligark? Apakah permasalahan klasik tentang bagaimana menyeimbangkan oligarki dengan demokrasi masih belum terjawab? Tidak sedikit upaya yang telah diambil untuk menjawab pertanyaan tersebut. Salah satu upaya yang muncul dalam lima tahun terakhir adalah konsep bisnis dan hak asasi manusia. Ada baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang oligarki dan konsep bisnis dan HAM sebelum membahas apakah konsep tersebut mampu mengontrol oligarki.

Jeffrey Winters mendefinisikan oligarki sebagai politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material. Menurutnya, sumber terpenting variasi oligarki terletak pada sifat ancaman terhadap kekayaan dan hak milik, dan bagaimana masalah utama pertahanan kekayaan dikelola secara politis. Oligark adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Oligark selalu individu, tak pernah berupa perusahaan atau kelompok lainnya. Mereka merupakan satu bentuk kekuasaan dan pengaruh minoritas berkat sumber daya material (uang) yang telah mereka kumpulkan secara pribadi dan mereka mau simpan serta pertahankan. Oligark juga bisa menjadi pemerintah, tapi tidak harus menjadi pemerintah. Dengan kata lain, oligark dan oligarki berasal dari konsentrasi kekayaan (dan kekuasaan dari kekayaan) yang ekstrim di tangan perseorangan, atau adanya kesenjangan ekonomi yang ekstrim.

Latar belakang munculnya konsep bisnis dan hak asasi manusia adalah meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan oleh operasi perusahaan. Sistem ekonomi neoliberal cenderung berdampak negatif terhadap pemenuhan hak asasi manusia karena minimnya peran negara dalam mengontrol pasar. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan cenderung untuk memfasilitasi kepentingan ekonomi daripada kepentingan publik, sehingga pemenuhan hak asasi manusia tidak terlaksana secara maksimal. Untuk itu, ada tuntutan masyarakat global agar perusahaan dapat dibatasi dan dikontrol negara, agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang terus meningkat, yang dianggap telah menyebabkan kemiskinan global. Dalam menghadapi

tuntutan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mensahkan hasil laporan Prof. John Ruggie yang telah dimandatkan untuk membuat studi terkait permasalahan antara perusahaan dan hak asasi manusia, yang kemudian dikenal sebagai Prinsip Ruggie.

Konsep Bisnis dan hak asasi manusia merupakan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan HAM (Prinsip Ruggie), yang terdiri dari tiga pilar dan bersifat sukarela. Pilar pertama adalah Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, dimana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk bisnis. Pilar kedua adalah Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti tidak melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi. Pilar ketiga adalah Kebutuhan untuk memperluas akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial. Ketiga pilar di atas juga dikenal sebagai prinsip *Protect, Respect, Remedy* atau Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan. Pilar-pilar di atas mempertegas pembagian tanggungjawab antara negara dan perusahaan, dimana negara bertanggung jawab untuk mendistribusikan keadilan terhadap masyarakat publik dan perusahaan. Sehingga tanggung jawab yang diemban oleh negara jelas lebih besar dari perusahaan.

Lalu, apa hubungannya dengan oligarki? Meskipun Prinsip Ruggie mempunyai pendekatan yang pragmatis, namun tidak dapat dipungkiri bahwa latar belakang munculnya konsep tersebut adalah untuk mengembalikan fungsi negara untuk berkuasa terhadap kekayaan yang berkembang sehingga tidak menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan kata lain, konsep tersebut, secara tidak langsung, diharapkan dapat mengontrol oligarki. Prinsip Ruggie yang terdiri dari tiga pilar tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran negara untuk mengontrol perusahaan melalui kebijakan, memberikan tanggungjawab terhadap perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, dan memastikan adanya mekanisme-mekanisme hukum dan non-hukum bagi perusahaan yang melanggar hak asasi manusia.

Kebijakan yang tumpang-tindih mengakibatkan ketidakpastian hukum. Untuk itu negara harus memastikan adanya kebijakan yang harmonis dan koheren, khususnya terkait bisnis dan hak asasi manusia. Selain kebijakan yang koheren, negara juga harus menegaskan ekspektasi negara terhadap perusahaan untuk tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia melalui operasi perusahaannya. Negara dapat mengambil langkah-langkah yang lebih untuk memastikan bahwa perusahaan menghormati hak asasi manusia, sebagai contoh, membentuk kebijakan yang mewajibkan seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia untuk menghormati hak asasi manusia. Hal ini mulai terlihat di Indonesia ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan Peraturan Menteri terkait Bisnis Perikanan dan hak asasi manusia pada 10 Desember 2015. Kebijakan tersebut menjelaskan tentang kewajiban perusahaan perikanan untuk menghormati hak asasi manusia. Dengan adanya kebijakan seperti di atas, meskipun Prinsip Ruggie bersifat sukarela, perusahaan harus tunduk terhadap kebijakan domestik dimana perusahaan itu berada.

Selain meningkatkan peran dan tanggung jawab negara, Prinsip Ruggie juga memberikan tanggung jawab terhadap perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia. "Menghormati" dalam hal ini adalah dengan mencegah terjadinya dampak negatif terhadap hak asasi manusia akibat operasi perusahaan melalui kebijakan HAM, uji tuntas hak asasi manusia, dan akses terhadap pemulihan. Perusahaan harus mempunyai kebijakan atau komitmen HAM yang menyatakan bahwa mereka akan menghormati hak asasi manusia. Kemudian, Perusahaan harus mampu menilai dampak-dampak apa saja yang dapat muncul akibat operasi perusahaannya terhadap masyarakat melalui pelaksanaan uji tuntas HAM. Apabila perusahaan terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, mereka harus memberikan akses terhadap pemulihan bagi orang-orang yang terkena dampak negatif akibat operasi perusahaannya. Dengan kata lain, tanggung jawab perusahaan lebih sedikit dibanding negara, yaitu dengan sebatas "menghor-

mati" bukan "melindungi" hak asasi manusia.

Negara harus memastikan adanya mekanisme yudisial maupun non-yudisial yang efektif akibat meningkatnya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan perusahaan. Mekanisme tersebut harus dapat diakses oleh masyarakat yang terkena dampak. Perusahaan dapat dituntut secara global melalui mekanisme-mekanisme non-yudisial apabila melanggar hak asasi manusia, yaitu mekanisme pengaduan OECD, RSPO, IFC, dst. Sementara mekanisme yudisial hanya dapat berfungsi di negara-negara dimana perusahaan itu beroperasi apabila negara tersebut sudah memiliki kebijakan terkait hak asasi manusia dan bisnis. Meskipun Prinsip Ruggie bersifat sukarela, namun perkembangan mekanisme non-yudisial global telah memberikan perusahaan tidak mempunyai pilihan lain, selain untuk ikut menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep bisnis dan hak asasi manusia memang terlihat untuk meningkatkan peran negara terhadap pemenuhan hak asasi manusia, yaitu melindungi hak asasi manusia dari pihak ketiga, termasuk dari bisnis. Namun, apakah hal tersebut berpengaruh terhadap oligarki? Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang tegas dalam melindungi hak asasi manusia dengan mewajibkan Prinsip Ruggie untuk diimplementasikan oleh perusahaan, dan menghentikan impunitas terhadap perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia misalnya, sebagai salah satu negara yang menjadi pusat investasi sejumlah perusahaan baik nasional dan asing maka perlu ada pengawasan khusus untuk memastikan konsep bisnis dan HAM dapat terimplementasi dengan baik. Pertanyaan besarnya adalah apakah pemerintah mampu menahan diri, dalam proses pembuatan kebijakan, dari pengaruh oligark untuk mempertahankan pendapatan mereka atau justru mendahulukan kepentingan masyarakat? Hal ini jelas menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, karena para oligark pemilik beberapa perusahaan besar di Indonesia yang sudah hampir menguasai panggung politik dan menjadi bagian dari pemerintah sejak zaman Orde Baru hingga pasca reformasi ini. Konsep bisnis dan HAM pada praktiknya dapat menjadi sebuah instrumen yang membatasi ruang gerak oligark namun tanpa pengawasan publik yang konsep tersebut dapat pula menjadi alat bagi oligark dalam melakukan ekspansi harta kekayaannya.



Kania Mezariani G

**Penulis adalah peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bidang Pembelaan HAM untuk Keadilan yang sedang menempuh studi S2 di Aberdeen University, Skotlandia*

Memelihara Konfrontasi Masyarakat Sipil Melawan Oligarki



*Ilustrasi melawan oligar*k (Sumber Solidaritas.net)

Oleh **Bramantya Basuki****

Di penghujung tahun 2015 lalu, Bank Dunia menyajikan sebuah laporan tentang Indonesia bertajuk *Indonesia's Rising Divide* yang menyajikan data mengenai ketimpangan ekonomi di Indonesia yang semakin melebar semenjak krisis ekonomi 1998 hingga 2014. Laporan tersebut patut untuk dicermati karena menyajikan sebuah penjabaran yang menarik mengenai hubungan tingkat kemiskinan dan disparitas ekonomi. Disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin (dengan jumlah konsumsi di bawah Rp. 300.000 per orang per bulan) mengalami penurunan dari 24 % di tahun 1999 menjadi 11,3 % di tahun 2014. Namun penurunan jumlah penduduk miskin ini malah berbanding terbalik dengan tingkat disparitas (diukur dengan koefisien Gini) yang naik dari 30 poin pada tahun 2000 menjadi 41 poin di tahun 2014.

Data ini memberikan kita beberapa gambaran kasar mengenai kondisi sosial ekonomi di Indonesia. Pertama adalah dengan semakin berkurangnya tingkat kemiskinan di Indonesia (data Bank Dunia bersifat makro dan perlu dibandingkan dengan data BPS misal), menandakan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi memberikan dampak pada berkurangnya tingkat kemiskinan tersebut. Dengan kata lain jumlah kelas menengah menjadi semakin banyak, meskipun posisi mereka belum dikatakan aman dari jerat kemiskinan. Lalu kedua, semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca reformasi justru memberikan keuntungan paling besar kepada golongan masyarakat atas. Hal ini terlihat dari tingkat kesenjangan yang semakin melebar, paling tidak terlihat dari tingkat konsumsi masyarakat: nilai konsumsi 10 % orang-orang paling kaya di Indonesia sama dengan konsumsi 54 % warga termiskin pada tahun 2015 lalu, naik dari tahun 2012 di mana konsumsi 10 % orang paling kaya di Indonesia setara dengan total konsumsi 42 % warga miskin.

Makin besarnya disparitas tersebut juga membuktikan bahwa dalam pertumbuhan ekonomi selama ini meski digadang membawa kemakmuran pada seluruh warga negara, nyatanya justru lebih menguntungkan bagi masyarakat golongan atas. Penyebab dari fenomena ini juga tidak bisa disederhanakan menjadi permasalahan mereka yang sedari awal mempunyai modal yang lebih besar akan lebih mampu untuk bersaing memperebutkan kue ekonomi daripada mereka yang tidak berpunya. Karena faktor-faktor pendorong ketimpangan sungguh beragam: permasalahan demografis atau jumlah penduduk yang banyak membuat persaingan makin susah, masalah timpangnya akses mereka yang ada di pusat dan di pinggiran, masalah tak setaranya pendidikan dan tingkat gizi, dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut tidaklah mungkin diselesaikan dengan segala keterbatasan mekanisme yang dimiliki oleh ekonomi liberal. Oleh karenanya, permasalahan ketimpangan ini tidak bisa dilihat secara parsial sebagai permasalahan ekonomi semata.

Politik yang Menyebalkan

Dalam negara demokratis, politik pun seharusnya bisa menjadi sebuah jalan untuk warga memperjuangkan kemakmuran bersama. Sistem demokrasi representatif, sebagai salah satu bagian dari politik, jika berjalan dengan baik akan menghasilkan sistem politik yang benar-benar dapat mewakili kepentingan seluruh warga. Politik melalui kehadiran negara juga seharusnya bisa diharapkan memutus rantai ketidakmampuan dari golongan bawah dan membatasi hak istimewa golongan atas yang dapat mengeksploitasi mereka yang lemah. Namun hasilnya akan jauh

berbeda ketika politik tersebut telah masuk dalam logika yang sama dengan logika penguasaan ekonomi oleh segelintir orang di atas.

Di negara ini, politik yang seharusnya menjadi salah satu jalan bagi warga untuk memperjuangkan haknya, atau memperjuangkan hal-hal yang dianggap penting untuk kemaslahatan bersama menjadi tak terakses akibat penguasaan tersebut. Untuk maju menjadi calon eksekutif atau legislatif dari satu partai politik, misal, syarat utama yang harus dipenuhi bukannya kecakapan si calon, namum berapa besar ia dapat menyediakan upeti untuk partai politik agar mendapat dukungan, juga segala biaya kampanye yang sangat besar jumlahnya. Kondisi ini membuat seorang calon harus mempunyai modal besar dengan mendapat dukungan para pemodal besar atau sedari dulu menjadi bagian para orang kaya tersebut. Tentu masuk dalam lingkaran orang-orang kaya, atau golongan sekitar 10 % orang Indonesia tersebut, bukannya tanpa kepentingan yang dititipkan atau tertanam.

Ketika melihat politik sebagai sebuah usaha ekonomi, saat modal yang dipinjamkan atau dimiliki harus kembali, maka yang terjadi adalah upaya habis-habisan untuk mengakumulasinya kembali. Berbagai cara mulai dari memuluskan proyek pada rekanan, memberi kemudahan perizinan, menjadi pelobi untuk mengesahkan peraturan atau undang-undang, dan cara-cara menggarong uang negara lainnya. Begitu menjamurnya praktek-praktek tersebut hingga terkenal adagium "5=2+2+1" saat seseorang menjabat: dalam 5 (lima) tahun masa jabatan, 2 (dua) tahun untuk mengembalikan modal, 2 (dua) tahun untuk menambah modal demi pemilihan kedepan, dan 1 (satu) tahun terakhir melakukan kerja-kerja populis untuk mendapatkan dukungan rakyat. Demikianlah saat di mana politik tidak lagi ditujukan untuk kepentingan publik lagi, alih-alih dikangkangi oleh golongan atas sekitar 10 % rakyat Indonesia. Penguasaan politik oleh segelintir orang demi mengakumulasi kekayaan inilah yang biasa disebut dengan oligarki. Di Indonesia, kuasa oligarki inilah yang membuat politik dalam demokrasi representatif menjadi sesuatu yang tidak lagi memberi harapan, malah justru mejadi sangat menyebalkan bagi banyak orang.

Oligarki dan Demokrasi: Dua Sisi Mata Uang?

Oligarki memang bukan suatu hal yang baru di Indonesia. Jika kita merujuk pada penjabaran Jeffrey Winters, juga Vedi Hadiz bersama Richard Robinson, sistem oligarki sudah mulai terlihat hadir di Indonesia sejak era Soeharto. Namun di masa Orde Baru tersebut, oligarki yang ada bersifat sultanistik, atau geraknya masih di bawah kendali satu patron, yaitu Soeharto sendiri. Penguasaan hampir bersifat penuh pada kendali militer, polisi, partai dan sistem politik, serta birokrasi membuat hal ini dimungkinkan. Namun setelah reformasi bergulir, sistem politik tak lagi dikuasasai oleh satu rezim, partai politik baru bermunculan, dwifungsi ABRI dihapuskan, dan otonomi daerah membuat kekuasaan relatif tak terpusat. Difusi kekuasaan inilah yang membuat karakteristik oligarki berubah drastis setelah zaman Orde Baru.

Tidak ada lagi kepatuhan pada satu patron membuat para oligark saling bersaing untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Meskipun begitu, mereka tetap direkatkan dengan jenis kepentingan yang sama: memperbesar pundi-pundi kekayaan mereka dengan cara mengangkangi sistem politik dan kalau bisa juga memanipulasi sistem hukum yang ada. Cara mereka menguasai sistem politik bisa dengan memajukan diri sendiri menjadi calon legislatif atau eksekutif, dan melakukan "penyesuaian-penyesuaian" hukum atau kebijakan yang menguntungkan mereka. Selain itu, bisa saja mereka tidak harus langsung maju menjadi para calon namun memberikan dukungan materiil pada salah satu calon dengan harapan balas jasa berupa koneksi, pemulusan proyek, maupun jabatan di pemerintahan. Apapun itu, yang pasti telah tercipta sebuah prasyarat tak tertulis bahwa untuk maju dalam demokrasi representatif, seseorang harus didukung dengan modal yang sangat besar dan politik balas jasa jadi susah terelakkan. Ini juga didukung dengan *status quo* Undang-Undang Partai Politik yang membuat persyaratan pendirian partai politik menjadi sangat mahal. Dengan demikian partai politik selamanya hanya mungkin bisa didirikan jika didukung oleh para oligark dan karenanya membuka lebar peluang politik transaksional. Fenomena ini adalah salah satu faktor yang membuat politik menjadi sesuatu yang sulit terakses warga, dan gerak politik warga sering terbatas di bilik suara karena politik dalam demokrasi representatif diperlakukan sebagai barang yang mahal.

Perlu ada catatan khusus juga mengenai gerak para oligark di era paska reformasi, terutama setelah proses Pemilu 2014 lalu. Hal ini berhubungan dengan naiknya sentimen populisme yang diusung oleh kedua calon presiden waktu

itu: Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Di satu sisi, Prabowo menggunakan nasionalisme sebagai sentimen populismenya dengan cara mengatasnamakan segala janjinya demi kepentingan bangsa dan negara. Hal ini juga terlihat dari pencitraan yang dipakainya menggunakan berbagai simbol-simbol nasionalis dengan menciptakan gambaran 'kepentingan asing' sebagai musuh bersama. Sedang di lain sisi, Jokowi menggunakan posisinya yang ada di luar sistem politik lama sebagai sentimen populismenya dengan cara menciptakan janji akan perubahan dan memerangi segala tindak korupsi, pelanggaran HAM, dan hal-hal lain yang mencitrakan bentuk politik Orde Baru. Populisme Jokowi juga tampak dari berbagai metode untuk menggambarkan dirinya sebagai bagian rakyat kebanyakan dengan *blusukan*, atau pencitraan sejenis di media.

Sewaktu masa Pemilu, banyak yang kurang menyadari bahwa sebenarnya keduanya ada di dalam lingkaran oligarki meskipun mengusung jenis sentimen populis yang berbeda. Di sinilah paradoksnya, populisme pada dasarnya mengatasnamakan atau memposisikan diri pada kepentingan orang banyak, publik, warga, rakyat atau apapun, namun pada kenyataannya hanya ditujukan untuk memuluskan kepentingan para oligark. Perkawinan antara oligarki dan populisme tersebut nyata terjadi di Indonesia kini. Dengan demikian, populisme yang mereka pakai secara umum bisa diartikan sebagai sebuah instrumen politik untuk mendapatkan dukungan dengan cara menciptakan fantasi mengenai polarisasi kepentingan: kita versus mereka. Pemenang dari pemilihan umum presiden 2014, Joko Widodo misalnya, setelah menjabat pada akhirnya menunjukan bahwa dirinya tak bisa lepas dari lingkaran oligark dengan politik balas jasa dalam penunjukan kabinet, belum ada upaya serius dalam penyelesaian kasus HAM (bahkan menunjuk pelanggar HAM dalam kabinetnya), dan membiarkan kehancuran salah satu instrumen penting dalam perlawanan terhadap oligarki: Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini membuktikan begitu kuatnya cengkraman oligarki dalam sistem politik Indonesia, bahkan populisme yang berangkat dari harapan akan kondisi ideal pun hanya menjadi intrumen untuk mengaburkan keberadaan para oligark.

Jika melihat pada penjabaran pada lini masa berkembangnya oligarki di Indonesia, tidak bisa dipungkiri bahwa mulai mengakarnya praktik oligarki dalam sistem politik berbarengan dengan era demokrasi liberal sesudah reformasi. Pertanyaan penting kemudian mengemuka: Apakah keberadaan oligarki tak terelakkan dalam sebuah sistem politik demokrasi representatif? Menjawab pertanyaan ini haruslah disertai dengan kecermatan agar tak terjerumus dalam fatalisme semacam: solusi untuk memberantas oligarki dengan demikian dengan menghapus demokrasi dan kembali pada totalitarianisme. Menyalahkan pengakuan terhadap kebebasan politik sesudah reformasi sebagai sumber utama masalah oligarki sama saja menyalahkan adanya kerumunan (di pasar, atau di dalam Bus, misal) sebagai penyebab pencopetan terjadi, sehingga solusinya fatalis: tak perlu ada kerumunan maka kasus pencopetan itu tak terjadi. Sebuah permasalahan jika ingin didapat sebuah penyelesaian yang efektif, maka tanggungjawabnya harus diletakkan pada subjek yang dapat dituntut tindakannya. Pada kasus pencopetan dalam kerumunan maka tanggung jawab bisa disematkan pada kehati-hatian orang di kerumunan dan penjaga keamanan. Dalam merajalelanya oligarki dalam demokrasi maka tanggung jawab itu diletakkan pada pemerintah yang memegang kekuasaan eksekutif, dan regulasi yang dibuat oleh legislatif serta diawasi oleh penegak hukum. Namun bagaimana bila oligarki justru paling bercokol di lembaga-lembaga tinggi itu sehingga perubahan sangat sulit? Di sinilah pentingnya posisi masyarakat sipil, termasuk di dalamnya organisasi masyarakat sipil dalam upaya transformasi di dalam sebuah negara dengan kondisi pemerintahan dan parlemen yang saling mengunci. Dalam bagian selanjutnya akan dibahas dengan lebih detail mengenai peran masyarakat sipil tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan saat menyalahkan kebebasan akan permasalahan yang muncul seperti oligarki dalam demokrasi, adalah tidak diperhatikannya adanya logika koruptif dalam penyelenggaraan kebebasan. Dalam kasus pelegalan politik dinasti oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang diatur dalam UU Pemilihan Kepala Daerah, misal, argumen yang dipakai adalah melarang politik dinasti sama saja melarang kebebasan untuk dipilih sebagai warga negara. Pernyataan MK tersebut tidak salah, namun menjadi problematik ketika diletakkan dalam konteks sistem politik Indonesia yang jelas-jelas dikuasai oligark. Seolah masalah pertentangan kepentingan dalam politik dinasti yang jelas-jelas mencederai kepentingan publik tak dihiraukan. Dibandingkan dengan tegasnya pemerintah maupun perangkat hukum dalam membatasi kebebasan sipil

pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik, atau penyampaian pendapat umum di aksi kamisan baru-baru ini, tampak bahwa penyelenggaraan atau pembatasan kebabasan oleh negara masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Konfrontasi Masyarakat Sipil

Pesimisme adalah suatu hal yang sulit dihindari dalam agenda melawan oligarki. Dalam sebuah sistem politik oligarkis mencari sebuah jalan keluar jelas bukan hal yang mudah. Harapan yang disematkan pada mereka yang maju menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif lebih sering terkooptasi dalam kuasa oligarki daripada setia pada amanat kepentingan rakyat. Namun jatuh pada keputusasaan tentu bukanlah pilihan. Apa yang terjadi di Islandia bahkan membuktikan bahwa perlawanan terhadap oligarki sangatlah dimungkinkan.

Setelah didera oleh krisis finansial yang dimulai di Amerika dan berimbas di Eropa tahun 2008, protes dari publik hampir mendera hampir seluruh dataran Eropa. Namun, salah satu protes yang cukup menampakkan hasilnya justru di Islandia, negara pulau di ujung utara dataran Eropa. Ketidakadilan mudah sekali dirasakan oleh warga yang terkena dampak krisis waktu itu, karena mereka harus menanggung lewat bail out ulah para bankir dan pemerintah yang seenaknya berjudi dengan ekonomi. Protes dari alun-alun kota menuju parlemen itu sempat disebut sebagai 'Revolusi Alat-alat Dapur' karena para pemrotes menggunakan panci dan wajan untuk melempar salju, bom asap, dan yogurt ke arah gedung parlemen. Tuntutan mereka agar Perdana Menteri dan kabinet bertanggung jawab atas kondisi krisis tersebut berhasil terpenuhi pada tahun 2009 saat Perdana Menteri Geir Haarde dari Partai Kemerdekaan mundur. Kemudian baru pada tahun 2010 mantan Perdana Menteri tersebut dianggap bersalah, serta hampir 26 pimpinan bank yang berafiliasi dengan perdana menteri dan Partai Kemerdekaan juga diseret ke meja hijau dengan total hukuman 74 tahun. Oligarki yang bercokol di Islandia dipaksa tunduk pada kehendak publik untuk perbaikan serius.

Tentu tidaklah sepenuhnya sesuai untuk membandingkan kasus di Islandia dengan di Indonesia begitu saja. Selain situasi politik berbeda, kondisi sosial-ekonomi, sistem hukum yang tidak serupa, serta momen perubahan *(kairos)* juga membuat kedua negara ini tidak bisa begitu saja dibandingkan. Namun satu hal yang paling perlu diperhatikan dari kemenangan kecil di Islandia adalah gerakan perubahan yang dimulai dari gerakan masyarakat sipil, disertai dengan kesetiaan pengembanan amanat publik dan perjuangan hingga bertahun-tahun. Gerakan masyarakat sipil di Indonesia, seperti reformasi 1998, meskipun berhasil menjatuhkan rezim berkuasa, namun belum dapat mengantisipasi pembajakan situasi perubahan itu oleh kaum oligark. Tulisan ini tidak mencoba untuk masuk lebih dalam kepada perdebatan tentang seberapa jauh sebuah gerakan dikatakan berhasil, dan mana yang dianggap gagal. Namun pembahasan yang dianggap perlu saat ini adalah tentang posisi dan *fidelity* (kesetiaan) dari gerakan masyarakat sipil tersebut.

Di dalam kondisi sistem demokrasi representatif sekarang yang dikuasai oligarki dan dicirikan dengan pemerintahan yang mengedepankan populisme sebagai instrumen semata, posisi gerakan masyarakat sipil menjadi sangat vital. Akan menjadi masalah jika dalam situasi dimana sistem representasi rakyat tidak berjalan dengan baik akibat kuasa oligarki itu, organisasi atau gerakan masyarakat sipil justru terlena dalam dalam sentimen populisme semu. Akibatnya fungsi dari gerakan dan organisasi masyarakat sipil yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong perubahan kehilangan daya kritisnya karena gagal menjaga jarak dengan kekuasaan. Lebih menggelikan lagi jika alasan tidak bisa menjalankan fungsi kritik kepada kekuasaan justru datang dari perasaan *ewuh pekewuh* karena ada tetua atau *konco dewe* yang duduk dalam posisi kekuasaan dan memaksakan agenda kekuasaan pada gerakan atau organisasi masyarakat sipil.

Contoh menarik adalah ketika Presiden Joko Widodo membeli berbagai jenis burung, reptil, dan amphibi di sebuah pasar hewan dan melepaskan di kebun raya Bogor. Secara sekilas laku itu seolah tampak dapat dibenarkan, bahkan sedikit dramatik, namun jelas bukan sebuah contoh tentang gagalnya melihat simpul permasalahan. Membeli binatang-binatang tersebut dari para pedagang justru mendorong perdagangan hewan ilegal menjadi semakin banyak. Melepaskan hewan-hewan tersebut tanpa kajian serius mengenai kesesuaian habitat juga langkah sembrono. Lebih jauh lagi, seharusnya akan jauh lebih tepat presiden menggunakan perannya sebagai pemimpin pemerintahan untuk memastikan regulasi tentang kelestarian lingkungan berjalan baik daripada seolah memelihara ketenaran melaui tindakan populisme instrumental. Di sinilah peran organisasi masyarakat sipil yang lebih mema-

hami persoalan untuk melancarkan kritik. Jika yang terjadi justru adalah kanalisasi kritik oleh pemerintah, seperti mengkritik boleh saja tapi silahkan disampaikan kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk dan tak perlu membuat gaduh dengan melancarkan kritik secara terbuka, maka yang terjadi adalah pembungkaman secara halus dan penghianatan terhadap nilai transparansi publik. Hal serupa yang terjadi dalam masa awal kasus pembakaran hutan 2015 lalu, terbukti proses penyelesaian yang digadang lewat kanal pemerintah tersebut melempem menghadapi para pemodal.

Namun tidak bolehkah kita mendukung kekuasaan? Apakah kekuasaan akan selalu salah? Dasar dari pandangan skeptis yang perlu diemban oleh gerakan atau organisasi masyarakat sipil bukanlah sekadar niat buruk yang diarahkan kepada kekuasaan. Akan tetapi sebuah kesadaran bahwa di mana terletak kekuasaan, kecenderungan untuk berbuat lancung menjadi semakin besar, apalagi dalam sistem politik yang dikuasai oligarki. Karenanya, dengan segala daya dan kemampuan yang dimiliki organisasi atau gerakan masyarakat sipil, seperti riset, advokasi, pendidikan, kampanye, serta bentuk tekanan politik lain; kesetiaan haruslah tetap diarahkan pada kepentingan publik daripada pada penguasa. Lebih jauh lagi, perlawanan terhadap oligarki perlu dijadikan sebuah platform bersama dalam menyusun kekuatan dari gerakan dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini dikarenanakan perlawanan terhadap oligarki tidak dimonopoli dalam bidang politik dan ekonomi, namun hampir di semua bidang. Yang paling jelas adalah dalam gerakan melawan korupsi, tekanan dari para oligark begitu terasa kuat di sana. Dalam bidang Hak Asasi Manusia juga serupa, para oligark merasa nyaman dengan penegakan HAM yang lemah karena akan selalu dapat menggunakan kekerasan untuk kepentingan mereka tanpa perlu kawatir soal penegakan hukum. Seperti halnya juga dalam pelestarian lingkungan hidup, selama pemerintah lebih mementingkan kepentingan ekonomi daripada keberlangsungan lingkungan di masa depan, eksploitasi untuk meraup keuntungan berlimpah bisa terus dijalankan para oligark.

Menjadikan konfrontasi kepada kuasa oligarki sebagai sebuah platform bersama tentu bukan suatu hal yang mudah. Menganggap tiap gerakan atau organisasi masyarakat sipil sebagai selalu bebas kepentingan privat dan hanya mengarahkan segala daya upaya untuk kepentingan publik juga berlebihan. Tapi sekali lagi dalam konteks peran, organisasi atau gerakan masyarakat sipil mempunyai kepentingan yang tentu berbeda dengan pemerintah yang terkunci dalam logika kekuasaan oligarkis. Karenanya posisi unik inilah yang mungkin dapat digunakan jika ingin dicapai lebih banyak lagi kemenangan-kemenangan kecil yang semakin lama akan membuncah menjadi gelombang besar.

*** Penulis adalah sekretaris umum kooperasi Sorge dan peneliti di Institute for Policy Analysis of Conflict.*



Bramantya Basuki

Membangkang Pada Penundukan

Resensi Film Mad Max: Fury Road

oleh **Miftah Fadli *****

Judul film: Mad Max: Fury Road
Sutradara: George Miller
Produser: Doug Mitchell, George Miller, P.J. Voeten
Distribusi: Warner Bros. Picture
Pemain: Tom Hardy, Charlize Theron, Hugh Keays-Bearn



Poster Film Mad Max : Fury Road

Di masa depan, seluruh permukaan bumi diselimuti gurun berpasir. Tidak ada yang tersisa selain tanah rawa yang mengandung asam, badai pasir dan manusia yang terpilah menjadi berandal-berandal kehausan. Bumi kekeringan dan satu-satunya sumber air bersih yang tersisa berada di Citadel, sebuah imperium di tengah gurun yang dikuasai oleh Immortan Joe (diperankan oleh Hugh Keays-Bearn)—lelaki tua sekarat beristeri lima yang menjadi peternak **(the breeders)** untuk melahirkan keturunan yang sempurna dan bebas radiasi tidak seperti kebanyakan warga Citadel. Bagi Joe, setiap orang yang tinggal di Citadel *(The Wretched)* adalah miliknya sebagaimana dia mengklaim kepemilikan atas air. Di hari-hari sekarat Bumi, airlah—bukan minyak bumi—yang menjadi sumber kekuasaan, dan oleh karena itu menjadi sumber peperangan.

Mad Max: Fury Road merupakan kelanjutan dari tiga sequel Mad *Max franchise* sebelumnya yaitu *Mad Max* (1979), *Mad Max 2* (1981) dan *Mad Max: Beyond Thunderdome* (1985). Setelah ledakan nuklir menyapu habis permukaan bumi hingga menjadi gurun pasir, Max Rockatansy (Tom Hardy) menjadi salah satu manusia di Bumi yang selamat. Singkat cerita, Max bertemu dengan Furiousa (Charlize Theron), salah satu letnan Joe yang berkhianat di tengah penugasannya mencari *gasoline* (baca: air), setelah berhasil lepas dari War Boys yang menjadikannya kantung darah bagi War Boys yang sekarat. War Boys sendiri merupakan kelompok paramiliter yang diambil dari anak-anak muda sehat dan kuat dari keturunan The Wretched dan dimanipulasi agar menjadi pengabdi bagi Immortan Joe demi memperoleh surga yang dijanjikan *(Valhalla)*. *Mad Max: Fury Road* melahirkan sebuah fantasi tentang oligarki yang sama keringnya dan ilusifnya dengan gurun berpasir.

Immortan Joe mewakili sosok oligark yang melakukan kontrol terhadap distribusi kapital (yaitu air) sekaligus menjadi manipulator untuk menjaga *status quo* kepemilikannya terhadap kapital. Citadel bukan sekedar sebuah kota, ia adalah sistem kekuasaan yang dikreasi oleh Joe di mana kehidupan setiap orang dihabituasi untuk selalu tergantung kepada kapital. Ketergantungan merupakan prakondisi namun di saat yang sama penundukan merupakan hal yang niscaya agar akses terhadap kapital dapat dibuka. Di dunia di mana oligarki menjadi sebuah imperium raksasa, penolakan terhadap penundukan adalah tindakan yang murtad. Pembangkangan terhadapi oligark merupakan keputusan yang melawan takdir manusia.

Hari-hari ini, oligarki menyembul di antara riak-riak privatisasi sumber daya alam yang diyakini menjadi alternatif paling niscaya untuk menuju kehidupan yang modern. Privatisasi memang menawarkan efisiensi dalam pengelolaan dan kepastian dalam distribusi namun oligarki juga bukan hanya melakukan eksploitasi terhadap sumber daya



alam itu sendiri; oligarki mengeksploitasi kemanusiaan, mematerialisasi manusia ke dalam siklus ketergantungan terhadap sistem kepemilikan kapital. Dalam masyarakat modern, mustahil rasanya memikirkan bahwa air, bumi dan udara sepenuhnya "dieksploitasi" secara komunal di mana setiap orang secara proporsional memperoleh apa yang menjadi haknya. Sayangnya kemustahilan pun sama ilusifnya dengan Valhalla yang oleh karenanya para War Boys rela mati demi "Joe yang Abadi."

Hidup di bawah bayang-bayang oligark seharusnya memuakkan. Oligark yang mengatur seseorang harus berbuat apa, siapa mendapat apa dan kapan seseorang mendapatkan apa yang sebetulnya menjadi haknya. Pembangkangan di Citadel justru datang dari orang yang berada di lingkaran kekuasaan Immortan Joe. Furiosa adalah seorang anak dari Tanah Para Ibu *(The Land of Many Mothers)* yang diculik oleh tentara Joe untuk mengabdi padanya. Selama 7000 hari hidupnya dihabiskan untuk melayani Joe memasok air, sumber kekuasaannya. Di tengah perjalanan ia memutar kemudi War Rig, mobil truk besar untuk mengangkut air dan memilih untuk kembali ke tana asalnya yang belakangan telah berubah menjadi rawa yag diselimuti asam. Di ujung jalan dia harus menghadapi fakta sulit: tidak ada satu-satunya cara untuk menjadi bebas selain memutus rantai kekuasaan sang oligark.

Bersama Tom dan lima isteri Joe yang ikut melarikan diri, Furiosa kembali ke Citadel untuk mengambil-alih satu-satunya kekuasaan yang dimiliki Joe. Pembangkangan Furiosa juga merupakan pembangkangan para perempuan terhadap karakter patriarki dalam oligarki. Dalam Mad Max: Fury Road, Furiosalah pembentuk jalan cerita: ia memberi perspektif dari kehadiran perempuan dalam lingkaran kekuasaan oligark bahwa perempuan punya fungsi yang lebih dari sekedar melahirkan oligark-oligark baru. Perempuan seharusnya menentukan pada posisi apa dia ingin berada dalam sistem kekuasaan. Kematian Joe di tangan Furiosa merupakan simbol atas kematian maskulinitas dalam oligarki dan kemenangan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Furiosa berhasil kembali ke Citadel bersama mayat Joe yang tewas dengan mulut robek menandaskan betapa oligarki telah menjadi bangkai. Ia bersama empat isteri yang tersisa—satu isteri Joe, Angharad, tewas tergilas mobilnya sendiri—mengambil alih singgasana Immortan Joe—yang kenyataannya tidak abadi—dan mulai mengalirkan air kepada warga Citadel. Tom, yang sejak awal menjadi sudut pandang dalam film, memilih untuk tidak ikut bergabung dengan Furiosa: sebuah momen pengakuan yang bijaksana.

****Penulis adalah Asisten Program Advokasi KebijakanLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*

NEW

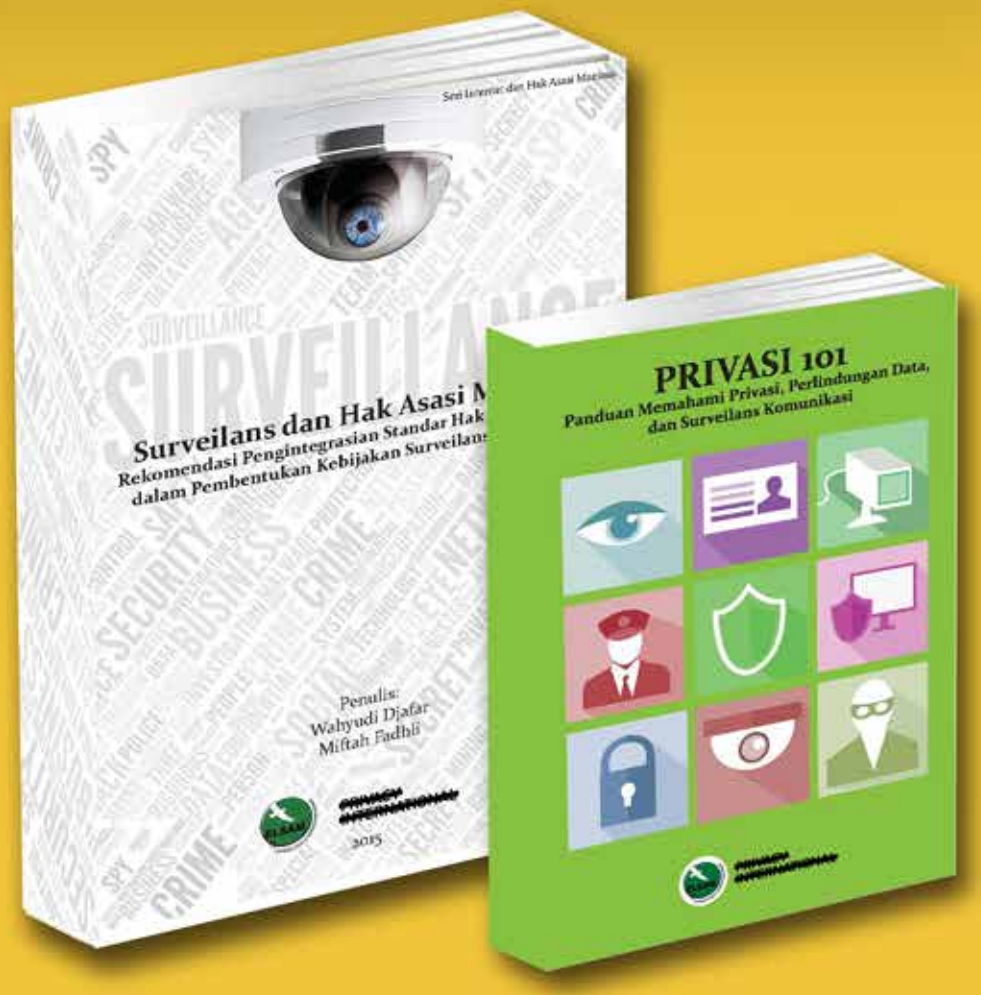

Silahakan Unduh di
http://elsam.or.id